ISBN No. 978-602-95330-3-3

Prosiding Seminar Nasional

Hasil Penelitian Dosen Kopertis Wilayah V Yogyakarta

Membangun Sinergi Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah V Yogyakarta dengan Masyarakat Melalui Penelitian Dosen

Buku 4: **Bidang Ilmu Sosial**

Departemen Pendidikan Nasional
Kantor Kopertis Wilayah V Yogyakarta
2009

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar iii

Sambutan Koordiantor Kopertis Wilayah iv

Daftar Isi v

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Di Wilayah Hukum Polda DIY (Studi Tentang Bentuk-bentuk *Trafficking* dan Alasan-alasan Oleh Pelaku) Oleh Cunduk Wasiati..... 1

2. Optimalisasi Kinerja Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh Nurul Rofikoh dan As. Martadani Noor 13

3. Modal Sosial Dalam Pengembangan Ecotourism (Ekowisata) Di Wilayah Pesisir Kabupaten Gunung Kidul Oleh Oktiva Anggraini..... 26

4. Optimasi Peran Lembaga Penelitian dalam Upaya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Puji Qomariyah 37

5. Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal Guna Meningkatkan Kualitas Keharmonisan Masyarakat Kecamatan Bambanglipura, Bantul Oleh Retno Kusumawiranti..... 50

6. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Pemerintah Di Kabupaten Sleman Oleh Sunarya Raharja 65

7. Hubungan Sosial (Komunitas dan Perkumpulan) Pada Masyarakat dan Kelompok Nelayan Kawasan Pantai Depok Bantul Oleh Supriyadi..... 78

MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN *ECOTOURISM* (EKOWISATA) DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Oktiva Anggraini
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL, Universitas Widya Mataram Yogyakarta, E-mail: oktivabiyan@yahoo.co.id.

ABSTRAK

Belum adanya kesepahaman pelaku wisata tentang pentingnya perlindungan wilayah konservasi dan pengelolaan sumber daya kelautan mengakibatkan pengembangan ekowisata yang diperkirakan menjadi potensi perubahan ekonomi pesisir kabupaten Gunung Kidul menjadi kurang optimal. Penelitian ini menyoroti kontribusi modal sosial dalam pengembangan *ecotourism* di wilayah kabupaten Gunung Kidul. Dengan desain kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data standar: wawancara mendalam *(in depth interview)*, studi dokumentasi dan observasi langsung, penelitian ini menunjukkan sejumlah hasil penelitian. Modal sosial di daerah penelitian: desa Kemadang dan desa Drini cukup berperan dalam pengembangan ekowisata setempat. Pertama, modal sosial mendorong meningkatnya usaha skala kecil atau mikro sesuai dengan potensi daerah dan potensi pasar yang mendukung pengembangan ekowisata. Kedua, berkurangnya jumlah penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan yakni penangkapan dengan bom atau bius serta penambangan karang.Rekomendasi penelitian ini: agar ditingkatkan penguatan peran kelompok wanita nelayan dan nelayan formal dan informal, pentingnya penegakan hukum bagi pelaku penambangan karang dan pemboman ikan serta pentingnya koordinasi instansi dalam pengelolaan ekowisata.

Key words: modal sosial, ekowisata.

PENDAHULUAN

Trend kembali ke alam atau *back to nature* semakin melengkapi gaya hidup masyarakat di berbagai belahan dunia belakangan ini. Tak luput dalam pemilihan kegiatan berwisata, trend *back to nature* semakin terasa dengan berkembangnya berbagai aktifitas ekowisata atau *ecotourism*. Dengan perkembangan trend demikian, Indonesia patutlah berbangga karena memiliki 50 taman nasional (43 taman darat dan 7 taman laut dengan luas 16,38 juta hektar) serta taman hutan raya sebanyak 9 unit dengan luas 337,69 ribu hektar. Dengan kata lain, keunggulan komparatif ini nantinya diharapkan dapat mengantarkan pariwisata Indonesia bersaing di tingkat internasional *(Kompas*, 26 November, 2006) .

Akan tetapi di balik potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia, kerusakan ekosistem laut dan problem lingkungan lainnya turut mengancam.Menurut Ministery of State for Environment (1996) dari luas terumbu karang yang ada di Indonesia sekitar 50.000 km2 diperkirakan hanya 7 % terumbu karang yang kondisinya sangat baik, 33 % baik, 46 % rusak dan 15 % lainnya kondisinya sudah kritis (Supriharyono, 2000). Kerusakan terumbu karang ini dipastikan sebagai akibat aktivitas manusia yang secara langsung dan tidak langsung, sengaja atau tidak tanpa memperhitungkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya.

Kerusakan ekosistem terumbu karang tidak terlepas dari aktivitas manusia baik di daratan maupun pada ekosistem pesisir dan lautan. Kegiatan manusia di daratan seperti industri, pertanian, rumah tangga akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif bukan saja pada perairan sungai tetapi juga pada ekosistem terumbu karang atau pesisir dan lautan. Menurut UNEP (1990) dalam Dahuri R..et al (2001) sebagian besar (80 %) bahan pencemar yang ditemukan di laut berasal dari kegiatan manusia di daratan *(land basic activities)*.

Dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut khususnya pada ekosistem terumbu karang secara bijak, optimal dan berkelanjutan maka salah satu caranya adalah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Di sinilah pentingnya disinggung peran modal sosial dalam pembangunan kawasan pesisir. Penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan Krishna (2002), Woolcock (1998), Putnam (1993) menunjukan adanya atribut sosial seperti rasa percaya, norma timbal-balik dan jaringan sosial yang memungkinkan para partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan pariwisata. Untuk mencapainya, dukungan struktur makro dan kondisi mikro di masyarakat amat dibutuhkan: (1) aspek kondisi makro (institusi formal, hubungan vertikal); dan (2) kondisi mikro (institusi informal, hubungan horisontal). Sedangkan Woolcock (1998) menawarkan paradigma modal sosial yang mencakup keterkaitan horisontal di dalam masyarakat lokal dan keterkaitan vertikal. Keempat dimensi modal sosial berikut perlu dikaji dalam melakukan analisis modal sosial: (1) Integrasi (*integration*) yaitu hubungan dengan anggota keluarga dan tetangga; (2) Keterkaitan (*linkages*) yaitu hubungan dengan komunitas luar dan antar komunitas; (3) Integritas organisasi (*organizational integrity*) yaitu institusi formal di tingkat makro; (4) Sinergi (*sinergy*) yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Di samping aspek kesejahteraan masyarakat, pengembangan suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil bila secara optimal dalam penelitian Gunn (1993) didasarkan kepada empat aspek yaitu: (1) mempertahankan kelestarian lingkungannya, (2) menjamin kepuasan pengunjung, dan (3) meningkatkan keterpaduan dan *unity* pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zone pengembangannya. Dalam hal ini pentingnya partisipasi lokal yang memberikan peluang efektif dalam kegiatan pembangunan (Linberg 1997). Hal ini berarti memberi wewenang atau kekuasaan pada masyarakat sebagai pemeran sosial dan bukan subjek pasif untuk mengelola sumberdaya membuat keputusan dan kontrol pada kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi kehidupan sesuai dengan kemampuannya. Goodwin (1997) menyarankan usaha untuk menjamin keikutsertaan masyarakat setempat dan langkah-langkah yang perlu dicari agar masyarakat setempat dapat benar-benar terlibat dalam kegiatan ekowisata. Perlunya interaksi ketiga pihak yang ikut terlibat, yaitu sektor pemerintah, swasta dan masyarakat setempat.

Dari sekian banyak kawasan ekowisata yang menarik di tanah air, desa pesisir Kemadang, pantai Baron dan pantai Drini, desa Banjarejo di kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, merupakan desa pesisir yang kini tengah menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya pesisir secara seimbang dalam kerangka pengembangan *ecotourism*

(ekowisata). Pemerintah setempat melalui Dinas Pariwisata dan Sub Dinas Pertanian dan Perikanan Bapeda Gunung Kidul mensosialisasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dengan berbagai program dan strategi. Larangan penggunaan bom atau *cyanida* dalam penangkapan ikan serta penggalian terumbu karang mendapat respon positif dari kelompok sadar wisata dan kelompok pengajian yang terbentuk. Akan tetapi, tantangan dari sekelompok nelayan pun masih ada. Belum adanya kesepahaman tentang pentingnya perlindungan wilayah konservasi, perilaku yang tidak hygienis dalam penyajian kedai ikan, minimnya pengetahuan kewirausahaan wanita nelayan, bila tidak ditangani dengan lebih serius, pada gilirannya akan menghambat pengembangan ekowisata setempat. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji modal sosial dalam pengembangan ekowisata di wilayah pesisir desa Kemadang dan desa Banjarejo Kabupaten Gunung Kidul.

METODE PENELITIAN

Dengan desain penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini mengambil lokasi di desa pesisir Kemadang, pantai Baron dan pantai Drini desa Banjarejo.Dipilihnya daerah tersebut dengan pertimbangan bahwa wisata kuliner saat ini tengah dikembangkan di kedua desa pantai tersebut, di samping perikanan tangkap. Dibanding 6 TPI di wilayah pesisir lainnya di kabupaten Gunung Kidul, kedua desa pantai itu banyak dikunjungi wisatawan karena pantainya yang indah dan wisata kulinernya. Wisata kuliner tersebut menjadi alternatif pilihan bagi turis asing maupun domestik. Di sisi lain, Kelompok Sadar Wisata dan kelompok nelayan serta wanita nelayannya (baik kelompok formal dan informalnya), sebagaimana yang diharapkan pemda setempat, berupaya agar dalam mengelola potensi laut tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Teknik pengumpulan data standar yang digunakan adalah wawancara mendalam *(in depth interview)* dengan teknik pemilihan informan *purpossive sampling* dengan pemrakrasa kegiatan ekowisata yakni Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, Sub Bagian Pertanian dan Perikanan Bapeda Gunung Kidul, organisasi terkait dan kelompok sasaran yakni pemuka atau tokoh masyarakat dan kelompok nelayan. Selain wawancara, data diperoleh dari studi dokumentasi dan observasi langsung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kontribusi Modal Sosial dalam Pengembangan Ekowisata:

a.. Meningkatnya usaha skala kecil atau mikro sesuai dengan potensi daerah dan potensi pasar yang mendukung pengembangan ekowisata.

Selaras dengan konsep Gunn (1993) bahwa meningkatnya kesejahteraan sosial dapat sebagai salah satu penentu keberhasilan pengelolaan kawasan wisata maka data empiris di lokasi riset menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Kemadang

seiring dengan bertambahnya arus wisatawan di pantai Baron. Semula, mata pencaharian masyarakat di desa Kemadang bertumpu pada pertanian, bertani di sawah maupun di ladang (di tahun 1970-an). Namun dengan maraknya arus wisatawan yang mengunjungi pantai Baron, penduduk setempat mulai tertarik menjadi nelayan dan tidak hanya menggantungkan diri pada bidang pertanian. Profesi nelayan selanjutnya menjadi sambilan utama. Hal inipun diikuti pola diversifikasi usaha para keluarga nelayan. Wanita dan anak nelayan yang pada awalnya hanya berkutat pada pekerjaan domestik, beranjak mengerjakan pemindangan ikan laut, pengasinan, industri kerajinan, usaha di bidang jasa wisata, membantu suami atau orang tua mereka menyiapkan peralatan untuk melaut, seperti jaring, umpan dan solar.

Diversifikasi usaha selain sebagai nelayan, keluarga nelayan banyak yang terjun menekuni usaha pengolahan ikan, pengasinan dan industri jasa yang mendukung pengembangan wisata bahari. Semula, jumlah pengolah ikan berkisar 30 wanita nelayan, kini mencapai 80 orang, hingga terbagi dalam kelompok-kelompok kecil pengolah ikan. Berdasar data potensi di desa Kemadang dan desa Banjarejo, meski telah terjadi diversifikasi usaha di masyarakat tersebut, pengelolaan sumber daya alamnya belum optimal. Hal ini nampak dari hasil kerajinan kerang-kerangan yang lebih banyak didatangkan dari luar daerah seperti kota Pacitan dan Cilacap. Potensi bahan mentahnya seperti kerang, pandan ataupun batu-batuan sebenarnya cukup melimpah di desa Kemadang dan desa Banjarejo namun karena semangat kewirausahaan dan minimnya sumber daya manusianya maka kerajinan yang ditawarkan justru tidak diproduksi sendiri melainkan didatangkan dari daerah lain. Potensi lain yang belum terbidik adalah potensi kesenian rakyat untuk dikemas dan memuaskan keinginan wisatawan. Tontonan yang selama ini disuguhkan di akhir pekan dan musim liburan lebih ke atraksi-atraksi dang dut dan musik rock.

Peningkatan kegiatan ekonomi tersebut diikuti dengan kinerja kelembagaan organisasi ekonominya. Meski baru berujud kelompok wanita nelayan dan belum berbentuk Koperasi Unit Desa, kegiatan simpan pinjam dan pemberdayaan wanita nelayan dilaksanakan melalui forum-forum yang diselenggarakan di desa tersebut. Akan halnya dengan para nelayan, pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang diatur melalui Perda no.3 tahun 2002 tentang Retribusi TPI mampu mengatasi persoalan klasik nelayan yakni meminimalisir ketergantungan mereka terhadap tengkulak. Dengan penerapan sistem lelang, sebagaimana diatur dalam perda ini, keuntungan dari penangkapan ikan juga dialokasikan bagi pengembangan desa, dana paceklik dan dana sosial. Ini memperkuat modal sosial yang tengah dikembangkan.Dana retribusi dari pengelolaan pantai Baron sebesar 5% yang dikelola desa Kemadang dirasakan terlalu kecil. Warga masyarakat melalui aparat setempat menginginkan agar jumlah prosentase ini diperbesar mengingat merekalah yang lebih banyak berkepentingan dalam mengembangkan kawasan wisata pantai Baron dan pantai Drini.

Bila ditinjau dari potensi hotel, penginapan dan rumah makannya pun secara kuantitas (68 unit) dapat menunjang keindahan pantai Baron sebagai salah satu destinasi di propinsi DIY. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Dinas Pariwisata kabupaten Gunung Kidul

telah mengadakan penyuluhan dan pelatihan bagi para pelaku wisata di kabupaten Gunung Kidul, termasuk desa Kemadang. Penekanan pada pembinaan wanita nelayan yang dilakukan Diskanla DIY dan Dinas Pariwisata pemkab Gunung Kidul sebenarnya berdasarkan kenyataan kebutuhan di lapangan bahwa pantai Baron dan sekitarnya tengah dirintis menjadi kawasan wisata kuliner. Di samping itu, wanita nelayan tetap membuka kedai nelayannya meski para nelayan tidak melaut karena cuaca yang tidak mengijinkan. Daya beli masyarakat pengunjung terutama saat hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya mendorong mereka untuk mendatangkan ikan segar dari Pacitan maupun Cilacap.

2. Adanya Peraturan Desa yang Mengatur Kewajiban Masyarakat Menjaga Lingkungan

Di samping indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, keberhasilan modal sosial dalam pengembangan ekowisata dapat ditilik dari ada tidaknya peraturan desa yang mengatur kewajiban warga masyarakat menjaga kelestarian lingkungan, termasuk adanya sanksi terhadap penggunaan bom atau bius dalam penangkapan ikan. Selain itu, berkurangnya jumlah penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan yakni penangkapan dengan bom atau bius serta penambangan karang. Berdasarkan data observasi, wawancara dan sekunder, ditemukan sejumlah penyimpangan seperti penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dengan potas dan penambangan karang. Di samping itu, pengambilan air laut, pasir dan ikan hias yang langka masih banyak dilakukan. Melalui berbagai pertemuan kelompok sadar wisata, kampung, arisan maupun pengajian, masalah pentingnya kelestarian lingkungan itu selalu diingatkan kepada warga masyarakat. Lambat laun, penyadaran ini akhirnya membuahkan hasil meskipun tidak maksimal.Artinya, jumlah pelanggaran mengalami penurunan namun masih ditemui juga penyimpangan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Perangkat desa maupun tim SAR yang mengetahui pelanggaran itu, dalam prakteknya kesulitan untuk menindak tegas pelakunya. Hal ini disebabkan sekian perda yang mengatur lingkungan, tidak dilengkapi dengan juklak dan juknisnya perihal sanksi yang harus diberikan kepada pelaku pelanggaran. Di samping itu, warga masyarakat yang melakukan merasa bahwa hal itu merupakan bagian dari mata pencaharian yang untuk waktu dekat bagi mereka sulit untuk digantikan karena kekurangmampuan mereka.

Berdasarkan data empiris kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi di desa Kemadang dan desa Banjarejo didominasi persoalan-persoalan penangkapan ikan dengan menggunakan dinamit/racun; tangkap lebih dan eksploitasi lebih terhadap tanaman lindung; polusi: (a) sumber-sumber industri (sampah); (b) sumber domestik (sampah rumah tangga dan sampah keras). Dalam pengelolaan sampah misalnya, melimpahnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke pantai Baron seringkali menambah volume sampah yang tertimbun namun tidak diikuti oleh pengelolaannya yang baik. Masyarakat setempat belum berinisiatif untuk menjadikannya kompos dan hanya membuangnya begitu saja melalui petugas DPU yang jam pengambilan sampahnya sering tidak menentu. Hal ini mengakibatkan pemandangan kurang sedap dan bau yang menusuk hidung yang mengganggu kenyamanan berwisata di Baron.

Faktor rendahnya kesadaran pengunjung pantai dalam membuang sampah di pantai Baron tersebut diperparah dengan jadwal pengambilan sampah yang tidak tepat sehingga sering menumpuk dan menimbulkan bau. Penyediaan kotak sampah di berbagai sudut atau rumah makan telah dilakukan namun kesadaran membuang sampah pengunjung ternyata masih rendah sehingga tetap membuang sampah makanan dan minuman kemasan secara sembarangan.

Dalam hal penghijauan, Di desa Kemadang tidak ditanami bakau melainkan daun pandan. Sejak tahun 1993-1995 berlangsung Program penghijauan yang diprakarsai UGM, penanaman serat dan hutan pantai serta ada penghijauan dalam rangka lustrum SMA Sentolo. Berdasarkan program itu, pembinaan dilakukan melalui pengelompokan petani dan nelayan. Setelah terbentuk tiga kelompok, selanjutnya masing-masing menerima uang pembinaan dari APBD sebesar 1,5 juta rupiah yang difungsikan untuk simpan pinjam yang langsung dikelola kelompok.

Masih berkaitan dengan upaya penyelamatan lingkungan dan mencegah abrasi laut, tahun 1996, pembinaan yang sama dikelola Dinas Perkebunan dan Kantor Pengendalian Dampak dan Lingkungan Gunung Kidul selama 3 tahun. Akan tetapi, kelompok nelayan dan petani yang tergabung, merupakan bentukan baru jadi tidak berdasarkan keputusan masyarakat setempat. Pada saat itu terbentuk dua kelompok yakni Kelompok wilayah Barat dan wilayah Timur. Selain bergerak di simpan pinjam, kelompok ini juga mengatur pemetikan pandan sedemikian rupa sehingga potensi pandan yang ditanam bisa menyejahterakan masyarakat pesisir. Sedang di sisi lain, lingkungan tetap terjaga. Persoalan kemudian muncul ketika pihak kelurahan merasa instansinya kurang '*diwongke*' dengan program baru ini apalagi mengabaikan kesepakatan kelompok-kelompok yang sebelumnya telah terbentuk.Selanjutnya, program pembinaan tersebut di luar pemantauan dari kantor kelurahan desa Kemadang.

Selain itu juga masalah konflik penggunaan lahan; pengrusakan kehidupan dan kepemilikan akibat bencana alam: badai, gempa bumi, angin topan *cyclone*.Bahkan karena gempa bumi yang melanda DIY dan Jawa Tengah 27 Mei, 2006, kondisi pantai selatan termasuk Baron yang terletak di desa Kemadang tak luput dari kerusakan. Tiga belas kapal nelayan dan kedai nelayan yang baru saja selesai dibangun, rusak diterjang amukan ombak.

Pada gilirannya, dapat disimpulkan bahwa modal sosial mampu menumbuhkan rasa kesetiakawanan warga untuk turut menanggung penderitaan saudara atau kerabatnya yang terkena musibah tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah ketika bencana terjadi. Demikian halnya dengan dorongan dan pembinaan dari pemda setempat terhadap program penghijauan, warga desa sebenarnya mudah untuk dilibatkan dalam pemanfaatan lahan untuk penghijauan.

3 Berkurangnya jumlah penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan yakni penangkapan dengan bom atau bius serta penambangan karang.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa penambangan terumbu karang

acapkali dilakukan meski tidak dalam jumlah besar. Hal ini berangkat dari kurangnya kesadaran para nelayan dan wanita nelayan bahwa terumbu karang merupakan tempat bertelurnya ikan-ikan yang dapat menjamin kelangsungan kehidupan di laut. Anggapan bahwa laut bebas merupakan milik siapa saja sehingga sah-sah saja bagi siapapun mengeksploitasinya tanpa harus menjamin kelestariannya.

Peneliti menemukan sejumlah keluarga nelayan menjajakan mulai dari kerang hingga potongan terumbu karang di lapak-lapaknya kepada para pengunjung pantai. Upaya-upaya pihak dua desa tersebut dalam menindak tegas pelaku penambangan karang dan pemboman ikan, memang masih kurang efektif mengingat ketiadaan juklis dan juklak perda Lingkunganlah yang membuat perangkat desa sulit untuk bertindak lebih jauh dari sekedar menegur pelakunya.

Di lain sisi, melalui berbagai forum kelompok sadar wisata, wanita nelayan, asongan dan PKK, berbagai penyuluhan tentang pentingnya pelestarian lingkungan telah dilakukan Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan kabupaten Gunung Kidul. Jumlah nelayan yang melakukan penangkapan ikan tidak ramah lingkungan cenderung menurun. Akan tetapi karena perdanya tidak diikuti dengan juklak dan juknis yang jelas maka bentuk pelanggaran seperti pengambilan pasir, ikan hias dan air laut belum bisa ditindak.Pemuka masyarakat dan pemuka agama melalui berbagai cara dan forum informal maupun formal yang diselenggarakan di desa Kemadang dan desa Banjarejo berperan dalam kampanye sadar lingkungan kepada masyarakat. Hal ini merupakan bagian dan kekuatan modal sosial yang semestinya terus dipupuk dan dikembangkan dalam mengelola potensi pesisir pantai Baron.

Berdasarkan paparan di atas nampak sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam pengembangan ekowisata. Pertama, keterbatasan sumber daya dan modal dasar sumber daya manusia serta kemiskinan yang melilit mengakibatkan pengelolaan ekowisata yang kurang optimal. Masyarakat pesisir berpotensi dalam berbagai program pemberdayaan sepanjang mereka memahami manfaatnya bagi kesejahteraan. Penataan wisata yang dilakukan pun belum menyentuh penyajian atraksi budaya lokal yang dapat mengangkat citra budaya lokal itu sendiri maupun pengemasan paket wisata yang menarik dan menguntungkan. Setiap destinasi wisata selalu mengalami pembaharuan dan penambahan produk baru yang mempunyai implikasi yang luas bagi kebudayaan, yang pada umumnya dilakukan oleh para profesional dalam pariwisata. Nampaknya hal ini, belum tersentuh secara serius di daerah penelitian.

Kedua, hambatan koordinasi dan penyatuan langkah instansi terkait dalam pengelolaan ekowisata serta minimnya pendanaan menjadikan pengelolaan ekowisata menjadi ajang rebutan masing-masing instansi tanpa berusaha melakukan pelibatan penuh dari masyarakat setempat.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Modal sosial yang dikembangkan di desa Kemadang dan desa Banjarejo, cukup mendukung pengembangan ekowisata. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya usaha kecil atau mikro sesuai potensi daerah dan potensi pasar yang mendukung ekonomi. Wanita nelayan dan keluarganya dapat menambah pendapatannya melalui kedai nelayan dan jasa wisata yang menopang pengembangan wisata kuliner pantai Baron.

Di lain sisi, melalui berbagai forum kelompok sadar wisata, wanita nelayan, asongan dan PKK, berbagai penyuluhan tentang pentingnya pelestarian lingkungan telah dilakukan Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan kabupaten Gunung Kidul. Pemuka masyarakat dan pemuka agama melalui berbagai cara dan forum informal maupun formal yang diselenggarakan di desa Kemadang berperan dalam kampanye sadar lingkungan kepada masyarakat Jumlah nelayan yang melakukan penangkapan ikan tidak ramah lingkungan cenderung menurun. Akan tetapi karena perdanya tidak diikuti dengan juklak dan juknis yang jelas maka bentuk pelanggaran seperti pengambilan pasir, ikan hias dan air laut belum bisa ditindak. Hal ini merupakan bagian dan kekuatan modal sosial yang semestinya terus dipupuk dan dikembangkan dalam mengelola potensi pesisir pantai Baron.

Berbeda halnya dengan daerah pantai Drini, modal sosial masyarakatnya cenderung kurang bagi pengembangan ekowisata yang disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat desanya terhadap penataan dan kelestarian lingkungan.Selanjutnya, pengembangan modal sosial dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi instansi pemerintah yang menangani pengembangan pantai Baron dan pantai Drini. Terkadang program pemerintah masih bersifat parsial dalam pembinaan dan pelaksanaan aneka program sehingga nampak tumpang tindih.

2. Saran

1. Penguatan peran wanita nelayan dan kelompok nelayan dapat dilakukan dengan pendampingan intensif meliputi bantuan teknis usaha dan administrasi sehingga tercipta diversifikasi usaha yang lebih menjanjikan secara ekonomi, menunjang kebutuhan wisatawan seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung pantai. Melalui kelompok-kelompok inilah berikut pokdarwis, kepentingan menjaga kelestarian alam ditanamkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dan bukan hanya mengandalkan peran aktif pemerintah.
2. Melalui forum-forum yang diprakarsai desa, sudah saatnya masyarakat desa dan pemerintah desa merumuskan peraturan desa bagi tindak pelanggaran pencemaran lingkungan maupun pengambilan sumber daya laut yang tidak bijaksana sehingga pelanggaran dan pencemaran lingkungan bisa dihindari.
3. Koordinasi instansi yang menangani pengembangan potensi pantai Baron dan pantai Drini agar ditingkatkan sehingga program pembinaan maupun pengembangan ekowisata lebih

optimal. Pihak penyelenggara pengabdian masyarakat atau riset dari kalangan perguruan tinggi dapat menilik dari program-program yang tengah dilakukan dan yang akan dilakukan pemerintah ataupun LSM di lokasi penelitian sehingga program yang diimplementasikan nantinya tidak mubazir ataupun kurang mendapat partisipasi dari masyarakat. Berbekal dengan data-data tersebut diharapkan muncul pengembangan model maupun penelitian tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir yang tetap mengacu pada pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, 2000, *Wisata Bahari: Industri yang Menjanjikan,* Tamasya, Jakarta.

Bengen D.G., 2001, *Sinopsis Ekosistem Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut,* Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan, IPB, Bogor.

Budiharsono S., 2001, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan,* Pradnya Paramita, Jakarta.

Baldwin P. and Brodess D., 1993, *Asia's New Age Travelers,* Asia Travel Trade.

Beatley, Brower and Schwab, 1994, *An Introduction to Coastal Zones Management,* Island Press, Washington.

Birkeland C., 1983, Influences of Topography of Nearby Land Masses in Combination with Local water Movement Patterns on the nature of Nearshore Marine Communities. Productivity and Processes in Island Marine Ecosystem. *UNESCO Report in Marine Science* No. 27 Dunedine.

Bryden J., 1973, *Tourism and Development: a Case Study of the Commonwealth Carribean,* Cambridge University Press, Cambridge.

Boo, 1992, The Eco-tourism Boom,*WHN Technical Paper,* WWF. Washington.

Cater E. and Lowman, 1994, *Eco-tourism: A Sustainable Option,* Whiley, London.

Carr, A.1980, *Some Problems of Sea Turtle Ecology,* Amer, Zool.

Carter, D., 1997, Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Australia. *Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia,* Jember, Indonesia.

Clark, L.H. 1997, Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Malaysia, *Makalah Seminar* Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia, Jember, Indonesia.

Choy, et. al. 1997, *Eco-tourism Planning: Lessons from South East Queensland Experience. Planning Sustainable Tourism,* ITB, Bandung

Clark, R. J., 1996, *Coastal Zone Management Hand Book,* CRC Lewis Publishers, Boca

Raton, Florida.

Dasgupta, P. 2002, *Social Capital and Economic Performance: Analytics*, University of Cambridge, Cambridge.

Dahuri R, Rais J, Sapta P.G., Sitepu M, 2001, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu* (Edisi Revisi), Saptodadi, Jakarta.

Faulkner B., 1997, *Tourism Development in Indonesia: The "Big Picture" Perspective. Planning Sustainable Tourism*, ITB, Bandung.

Goodwin H., 1997, *Terestrial Ecotorism. Planning Sustainable Tourism*, ITB, Bandung.

Grootaert, C., D . Narayan, VN Jones & M. Woolcock, 2003, *Integrated Questionaire for the Measurement of Social Capital (SC-IQ)*, World Bank, Washington, DC.

Isham, J, 2000, Can Investments in Social Capital Improve Well-Being in Fishing Communities? A Theoretical Perspective for Assessing the Policy Options, *Paper* presented at the IIFET Conference, Corvallis, USA, Juli.

Krishna, A, 2002, *Active Social Capital: Tracing the Roots of Development and Democracy*, Columbia University Press, New York.

Kusudianto, 1996, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, UI Press, Jakarta.

Lindberg. K., 1991, *Policies for Maximizing Nature Tourism Ecological and Economic Benefit*, World Resources Institute.

Lindberg K. dan Hawkins E.D, 1995, *Ekoturisme : Petunjuk Untuk Perencanaan dan Pengelolaan. The Ecotourism Society*, North Benington, Vermont.

Narayan, D, 1999, Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty, Policy Research *Working Paper 2167*, Poverty Division, Poverty Reduction and Economic Management Network, World Bank, Washington, DC.

Putnam, RD, 1993, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton University Press, New Jersey.

Rosyadi, S., R.Birner, and M.Zeller, 2005, Creating political capital to promote devolution in the forestry sector – a case study of the forest communities in Banyumas district, Central Java, Indonesia, Forest Policy and Economics .

Sutopo, HB, 1988, *Penelitian Kualitatif, Dasar, Teoritis, Praktis*, UNS Press, Surakarta.

Supriana N., 1997, *Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Pelestarian Alam. Planning Sustainable Tourism*, ITB, Bandung

Silver C., 1997, *Urban Based-Eco-tourism in Indonesia. Planning Sustainable Tourism*, ITB, Bandung.

Soeriatmadja, 1997, *Prospect of Developing Marine and Beach Tourism in Indonesia.*

Planning Sustainable Tourism, ITB, Bandung.

Steele P., 1993, *The Economics of Eco-tourism. Focus 9*

Sorensen and Cearry, 1990, *Coast: Institutional Arrangements for Managing Coastal Resource*, University of California, Barkeley.

Suarez and Starbird, 1995, A Traditional Fishery of Leatherback Turtles, in Maluku. Indonesia, *Marine Turtle Newsleter.*

Supriharyono, 2000, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

World Tourism Organization, 2000, *Tourism Trends*, Madrid.

Wyasa B., 2001, *Meluruskan Pengertian Ekowisata. Tamasya*, Jakarta.

Wight P.,1994, Environmentally R*esponsible Marketing of Tourism*, Wiley, London.

Whelan, 1991, *Nature Tourism :Managing the Environment*, Island Press, Washington.

Ziffer K.A, 1989, *Eco-tourism: The Uneasy Alliance*, Conservation International.

SURAT KABAR

Kompas, 26 November 2006.